

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Partai Golongan Karya yang biasa disingkat dan dikenal dengan Partai Golkar merupakan salah satu partai yang berdiri sejak era sebelum reformasi hingga saat ini. Partai Golkar merupakan partai dengan jumlah kader yang besar dan tersebar di beberapa daerah di Indonesia, hal tersebut dikarenakan tidak luputnya perjalanan yang panjang yang telah dialami oleh partai ini. Pada saat berdirinya partai ini di tahun 1964, Partai Golkar pada saat itu bukanlah organisasi yang berbentuk partai melainkan Sekber (sekertariat bersama).

Sekber Golkar resmi terbentuk pada tanggal 20 Oktober 1964 dengan menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu.<sup>1</sup>

Sejak berdirinya partai Golongan Karya ini telah melakukan sembilan kali pergantian ketua umum. Pergantian ketua umum sebanyak sembilan kali tersebut terjadi dalam kurun waktu 50 tahun mulai dari tahun 1964 – 2014. Ketua umum Golkar pertama kali dijabat oleh Djuhartono (1964 – 1969) lalu digantikan Suprpto Sukowati (1969 – 1973). Lalu selanjutnya diteruskan oleh Amir

---

<sup>1</sup> Sekber Golkar pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya pada tahun 1964 oleh angkatan darat untuk menandingi pengaruh partai komunis indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, sekber Golkar berubah wujud menjadi golongan karya yang menjadi salah satu organisasi peserta pemilu

Moertono (1973 – 1983), Sudharmono (1983 – 1988), Wahono (1988 – 1993), Harmoko (1993 – 1998), Akbar Tandjung (1998 – 2004), Jusuf Kalla (2004 – 2009), Aburizal Bakrie (2009 – 2015)<sup>2</sup>.

Di era demokrasi ini ada dua ketua atau dua periode kepemimpinan Golkar yang dirasa menjadi sejarah partai beringin ini, yang pertama adalah kepemimpinan Akbar Tandjung (1998 – 2004). Pada saat itu Golkar menjadi partai yang diujung tanduk karena kondisi politik pada saat itu sangat tidak berpihak pada Golkar.

Munaslub Golkar tahun 1998 telah mengubah tradisi Golkar dalam pemilihan ketua. Golkar pertama kali melakukan pertama kali sistem demokrasi untuk memilih calon ketua umumnya. Pada saat itu muncul 3 nama yang menjadi kandidat ketua umum Golkar yaitu, Edi sudrajat, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Akbar Tandjung<sup>3</sup>. Dalam munaslub Golkar 1998, Akbar Tandjung muncul sebagai ketua umum Golkar terpilih mengalahkan calon lainnya melalui dua putaran.

Sebagai ketua umum terpilih pada tahun 1998, Akbar Tandjung menjadi ketua umum Golkar yang legendaris karena pada saat itu Golkar dalam kondisi krisis politik atau banyak tekanan dari eksternal yang mengintimidasi Golkar. Intimidasi pada Golkar tidak lepas dari kondisi politik nasional yang pada saat itu Golkar mempunyai atribut kental dari masyarakat adalah partainya pemerintah ORBA (Orde baru).

---

<sup>2</sup>DPP Partai Golkar. 2013, *Sejarah Partai Golongan Karya*, diakses pada tanggal 4 Mei 2015 Pukul 22:46 WIB, dari <http://partaiGolkar.or.id/Golkar/sejarah-partai-golongan-karya/>

<sup>3</sup>Akbar Tandjung. *The Golkar way: survival Partai Golkar di tengah turbulensi politik era transisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007. hlm 290

Pada tahun 1998 terjadi reformasi besar – besaran di negara Indonesia ini. Presiden saat itu , Soeharto, digulingkan oleh kekuatan massa yang begitu besar. Kekacauan terjadi dimana – mana dan Soeharto yang pada saat itu sebagai presiden sekaligus menjabat ketua dewan pembina PartaiGolkar mendapatkan tekanan yang begitu besar untuk turun dari jabatan presiden. PartaiGolkar juga mendapatkan tekanan untuk bubar karena dinilai PartaiGolkar adalah partai yang pro dengan Soeharto pada saat itu.

Pekerjaan rumah yang sangat besar bagi Akbar Tandjung pada saat itu untuk membersihkan citra PartaiGolkar dari tekanan masyarakat dimana – mana. Akan tetapi, secara perlahan tapi pasti Akbar Tandjung dapat merubah citra PartaiGolkar yang buruk di mata masyarakat perlahan – lahan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap PartaiGolkar. Salah satu langkah yang diambil oleh Akbar Tandjung pada saat itu adalah mempartaikan PartaiGolkar untuk menghilangkan image dari masyarakat bahwa PartaiGolkar adalah organisasi orde baru.

Perolehan persentase suara Partai Golkar cenderung stabil berada dalam dua digit. Pada pemilihan umum 1999, Partai Golkar memperoleh suara sebesar 22,44% dengan konversi perolehan kursi sebanyak 120 kursi di parlemen, sebagai partai pemenang kedua setelah PDIP. Sementara pada pemilu 2004, perolehan suara Golkar adalah sebesar 23,27% naik tipis beberapa persen namun dalam skema hasil kompetisi pemilu 2004 antar partai, PartaiGolkar adalah partai

dengan perolehan suara tertinggi<sup>4</sup>. Data tersebut menunjukkan bahwa Partai Golkar dibawah kepemimpinan Akbar Tandjung merangkak naik untuk memperoleh kepercayaan kembali dari masyarakat Indonesia. Dari hasil kinerja Akbar Tandjung pada saat itu , beliau menjadi salah satu ketua umum Partai Golkar yang legendaris.

Tabel 1.1 Jumlah Perolehan Suara Partai Golkar dalam Pemilihan Umum

NO	Tahun	Jumlah Suara Partai Golkar
1	1999	23.741.749 <sup>5</sup>
2	2004	24.480.757 <sup>6</sup>
3	2009	15.037.757 <sup>7</sup>
4	2014	18.432.312 <sup>8</sup>

Kepengurusan lain setelah kepemimpinan Akbar Tandjung yang menjadi sejarah di Partai Golkar adalah pada saat partai ini dipimpin oleh Aburizal Bakrie (2009-2015). Pada saat kepemimpinan Aburizal Bakrie banyak terjadi perubahan-perubahan di dalam partai berlambang pohon beringin ini. Pada saat pemilu 2014, Aburizal Bakrie mengambil langkah untuk mendukung calon presiden Prabowo Subianto. Partai Golkar menjadi salah satu partai inti dari koalisi yang dibentuk

<sup>4</sup>Poltracking Indonesia.2015, *Partai Golongan Karya (Partai Golkar)*.2015, diakses pada tanggal 4 Mei 2015 Pukul 23:16 WIB, dari <http://www.poltracking.com/partai-golongan-karya-partai-golkar>

<sup>5</sup><http://semut35.blogspot.co.id/2014/04/hasil-pemilu-legislatif-1999-2004-2009.html>diakses tanggal 10 Desember 2015

<sup>6</sup>Ibid

<sup>7</sup> <http://politik.news.viva.co.id/news/read/496072-perolehan-suara-partai-golkar-di-tiga-pemilu> diakses tanggal 10 Desember 2015

<sup>8</sup>Ibid

oleh Prabowo yaitu koalisi merah putih.<sup>9</sup> Dari sinilah timbul akar perpecahan di dalam internal Partai Golkar karena pada dasarnya tidak semua kader Partai Golkar mendukung keputusan sang ketua umum, Aburizal Bakrie. Beberapa kader mendeklarasikan untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakilnya yaitu Jokowi – Jusuf Kalla dengan alasan calon wakil presiden tersebut merupakan satu kader Partai Golkar yaitu Jusuf Kalla, sehingga pada saat masa kampanye pemilu 2014 tahun lalu sebagian kader Partai Golkar mendukung pasangan Jokowi – Jusuf Kalla<sup>10</sup>.

Kondisi internal Partai Golkar semakin bergejolak ketika memberi aturan untuk seluruh kader partai yang apabila mendukung pasangan Jokowi – Jusuf Kalla akan diancam dipecat dari kader partai. Banyak argumen yang kemudian menolak tentang kebijakan Abu Rizal Bakrie tersebut, akan tetapi semua argumen yang dilontarkan kepada ketua umum Partai Golkar tersebut tidak ada pengaruh untuk merubah kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah melalui pemilihan presiden yang menghasilkan kekalahan pada Prabowo Subianto – Hatta Rajasa, Partai Golkar segera mengambil sikap politik untuk tetap loyal kepada koalisi merah putih yang sehingga partai ini pertama kalinya berada diluar pemerintahan. Dalam sejarah Partai Golkar, tidak pernah sekalipun Partai Golkar menjadi partai oposisi pemerintahan. Partai Golkar selalu menjadi partai yang menjadi koalisi pemerintahan.

---

<sup>9</sup> Koalisi Merah Putih adalah koalisi partai politik di Indonesia yang mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden tahun 2014. Koalisi ini terdiri dari Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Golkar.

<sup>10</sup> Mardani.2013, *Golkar Pecah Satu-Persatu Lari ke Jokowi-JK.2014*, diakses pada tanggal 4 Mei 2015 Pukul 23:26 WIB, dari <http://www.merdeka.com/politik/Golkar-pecah-satu-persatu-lari-ke-jokowi-jk.html>

Kondisi tersebut menimbulkan semakin besarnya perang dingin di dalam internal partai berlambang pohon beringin tersebut sehingga menimbulkan manuver politik dari beberapa kader Partai Golkar kepada sang ketua umum, Aburizal Bakrie. Akan tetapi Aburizal Bakrie tetap pada langkah awalnya yaitu tetap loyal kepada koalisi merah putih dan secara otomatis menjadi oposisi pemerintah.

Partai Golkar pada saat itu juga dihadapkan dengan agenda untuk mengadakan Munas (Musyawarah Nasional) Partai Golkar dalam rangka menentukan pemimpin baru partai tersebut. Menurut hasil munas Riau, seharusnya masa jabatan Aburizal Bakrie terhitung sampai tahun 2014. Akan tetapi, karena di tahun tersebut partai Golkar akan disibukkan dengan pemilu maka munas Golkar diadakan tahun 2015<sup>11</sup>. Pro kontra banyak bermunculan dan atas dasar ini DPP Golkar mengadakan Rapimnas di Yogyakarta yang bertujuan untuk menetapkan diadakannya munas.

Bakal calon yang muncul pun tidak sedikit setidaknya terdapat beberapa nama kader Partai Golkar yang muncul seperti MS Hidayat, Priyo Budi Santoso, Agung Laksono, Airlangga Hartanto sampai calon incumbent yaitu Aburizal Bakrie. Pada tahap pencalonan ketua umum Partai Golkar, calon-calon yang mengajukan diri untuk bertarung memperebutkan kursi ketua umum

<sup>11</sup> <http://nasional.sindonews.com/read/779341/12/tantowi-masa-jabatan-ical-sesuai-hasil-munas-golkar-2009-1378298651>. diakses tanggal 13 Desember 2015

merasadi persulit dalam hal administratif dan semua itu diadukan kepada ketua dewan pertimbangan Partai Golkar pada saat itu, Akbar Tandjung<sup>12</sup>.

Melihat kondisi seperti itu, ketua umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie mengadakan rapat pleno tertutup untuk membahas beberapa poin untuk keberlangsungan Partai Golkar kedepan. Poin-poin yang dibahas adalah menentukan diadakannya Munas, menunjuk SC Munas yang akan diselenggarakan sertaisu yang sedang hangat di kancah perpolitikan nasional. Rapat pleno yang diadakan di Yogyakarta tersebut menghasilkan nama Nurdin Halid untuk menjadi ketua SC munas yang akan diselenggarakan Partai Golkar. Penunjukkan Nurdin Halid ternyata mendapatkan respon negatif dari bakal calon ketua umum Partai Golkaryang lain yaitu Agung Laksono. Menurutnya pemilihan ketua SC Rapimnas Golkar tak boleh mementingkan kelompok tertentu. Sosok Nurdin Halid yang dekat dengan Aburizal Bakrie pun diduga untuk memuluskan langkahnya menjadi ketua umumPartai Golkar untuk yang kedua kalinya<sup>13</sup>.

Manuver yang dilakukan oleh Agung Laksono pada saat itu ternyata tidak mampu membuahkan hasil yang diinginkan, sosok Nurdin Halid tetap menjadi ketua SC munas yang akan diselenggarakan oleh Partai Golkar, kemudian Nurdin Halid pun meminta agar Munas parti segera dilaksanakan. Sehingga Munas Partai Golkar yang pada awalnya akan dilakukan pada awal tahun2015 dipercepat menjadi 30 November 2014 di pulau Bali.

---

<sup>12</sup>Mardani. 2014, *Pecah Kongsi Akbar-Ical Jelang Munas Golkar*, diakses pada tanggal 5Mei 2015 Pukul 21:46 WIB, dari <http://www.merdeka.com/politik/pecah-kongsi-akbar-ical-jelang-munas-Golkar/akbar-rangkul-para-bakal-calon-ketua-umum-Golkar.html>

<sup>13</sup>Efendi Ari Wibowo. 2014, *Agung Laksono Pertanyakan Nurdin Halid Jadi SC Rapimnas Golkar*, diakses pada tanggal 5Mei 2015 Pukul 22:16 WIB, dari<http://www.merdeka.com/politik/agung-laksono-pertanyakan-nurdin-halid-jadi-sc-rapimnas-Golkar.html>

Melihat fenomena yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa internal Partai Golkar pecah menjadi dua kubu yaitu kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie. Kubu Agung Laksono tidak menyetujui Munas diadakan di Bali sedangkan kubu Aburizal Bakrie pun tetap ngotot mengadakan munas di Bali dan penyelenggaraanya dipercepat. Kejadian tersebut semakin memperkeruh suasana yang ada di dalam internal Partai Golkar. Tidak hanya menolak munas Bali, kubu Agung Laksono juga mempertegas bahwa Partai Golkar keluar dari koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo Subianto menjadi presiden pada saat pilpres 2014 kemarin<sup>14</sup>.

Walaupun banyaknya tekanan yang timbul dari internal Partai Golkar, Aburizal Bakrie beserta para kader Partai Golkar yang setuju diadakannya Munas di Bali tetap mengadakan Munas. Langkah tersebut membuat kubu Agung Laksono menyatakan tidak akan mendatangi acara Munas tersebut dan menolak hasil Munas yang diselenggarakan di Bali tersebut. Alhasil, Munas di Bali tetap diselenggarakan dengan dihadiri oleh seluruh perwakilan DPD I dan DPD II Partai Golkar seluruh Indonesia. Acara Munas di Bali dihadiri kurang lebih 2000 kader partai seluruh Indonesia dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Penyelenggaraan munas Partai Golkar di Bali berlangsung secara kondusif dan menentukan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum Partai Golkar tahun 2014-2019.

Hasil dari Munas Bali tidak yang menentukan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum berujung pada penolakan dari kubu Agung Laksono sehingga tidak

---

<sup>14</sup>Silvanus Alvin. 2014, *Tolak Munas Bali Kubu Agung Pertegas Golkar Keluar dari KMP*, diakses pada tanggal 5 Mei 2013 Pukul 22:16 WIB, dari <http://news.liputan6.com/read/2143954/tolak-munas-bali-kubu-agung-pertegas-Golkar-keluar-dari-kmp>



lama setelah Munas Bali selesai, diadakan Munas tandingan yang diselenggarakan di Ancol dengan ketua penyelenggara Munas Ancol yaitu Yorrys Raweyai. Munas Ancol tidak semeriah Munas yang diadakan di Bali. Munas Ancol yang diselenggarakan di Hotel Westin hanya dapat mengumpulkan kader tidak sampai 1000 orang. Berbanding terbalik dengan Munas yang diadakan di Bali yang jumlah peserta yang hadir mencapai 2000 kader partai. Secara keamanan Munas Ancol juga tidak terlalu ketat penjagaanya dan Munas ini pun berlangsung secara sederhana.

Tidak sampai di Munas itu saja, pertarungan antara dua kubu di Partai Golkar berlanjut sampai kepada pengakuan dari kementerian hukum dan ham (kemenkumham). Dua pengurus Partai Golkar ini mengirimkan surat pernyataan hasil Munas dan berlomba lomba mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Pada akhirnya kepengurusan yang disahkan adalah kepengurusan yang dipimpin oleh Agung Laksono dan kepengurusan Aburizal Bakrie tidak disahkan. Perseteruan ini berlanjut sampai meja hijau, kubu Munas Bali melayangkan surat tuntutan yang dilandasi ketidak terimaan atas keputusan kemenkumham atas putusnya yang mengesahkan Munas Ancol versi Agung Laksono.

Berikut isi Surat Keputusan (SK) Menkumham terkait dengan pengesahan perubahan AD/ART Partai Golkar :

- 1) Mengesahkan Permohonan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dengan kedudukan kantor tetap di JL. Anggrek Nelly Murni, Jakarta 11480. Telp/Fax (021) 5303380 yang dinyatakan dengan

Akta Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya Nomor 45 tanggal 16 Desember 2014 serta Akta Tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor 12 tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Surjadi, S.H.,M.Kn berkedudukan di Kota Jakarta.

- 2) Susunan kepengurusan tingkat pusat partai politik tersebut terlampir dalam Keputusan ini.
- 3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- 4) Setelah berlakunya keputusan ini, maka Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 27 April 2010 tentang pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009-2015 serta susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia IR Nomor: M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009-2015 tidak berlaku lagi.
- 5) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Banyak argumen bermunculan bahwasannya keputusan kemenkumham ini tidak berlandaskan fakta dan aturan yang berlaku tetapi berlandaskan tendensi politik tertentu yang dimana kepengurusan Agung Laksono mendklarasikan akan menjadi koalisi pemerintah. Tidak ada bibit bibit untuk islah dari perseteruan ini walaupun beberapa pihak banyak yang menyayangkan kejadian yang terjadi di dalam tubuh partai pohon beringin ini.

Tentu saja perseteruan konflik yang terjadi ini menjadikan pengalaman buruk sepanjang Partai Golkar berdiri. Pecahnya internal DPP Partai GOLkar membuat banyak pihak bingung serta menjadi cacat di mata masyarakat indonesia terutama kader partai yang ada di dalamnya. Kepengurusan Partai Golkar yang berada di tingkat I dan II yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota pun menjadi bingung ketika diharuskan dihadapkan dengan adanya dualisme Partai Golkar yang tersebar secara eksplisit ini. Banyak argumen yang menyatakan bahwasannya perseteruan ini tidak akan ada habisnya dan akan berdampak panjang pada keberlangsungan Partai Golkar mengingat kedua kubu memiliki kekuatan dan massa atau pendukung masing-masing.

Di Kota Surabaya, konflik yang terjadi diantara dua kubu ini mempersulit roda organisasi partai yang ada di tingkatan kota ini yaitu DPD Partai Golkar Kota Surabaya. Seperti halnya dalam melaksanakan Pilkada, kemudian arah dukungan kepada kubu tertentu juga pastinya akan menentukan arah keberlangsungan partai di tingkat kota. Kader-kader yang berada di dalam Partai Golkar baik di tingkat kota ataupun provinsi bergantung pada tanggapan dan sikap politik yang ditentukan, pasalnya Kubu Aburizal Bakrie melayangkan putusan tegas yaitu

dikeluarkan dari kepengurusan partai apabila menolak hasil dan juga penyelenggaraan Munas Bali maka kader akan dikeluarkan dari partai.

Melihat fenomena di atas, peneliti ingin lebih mendalami permasalahan yang terjadi di partai Golkar dengan mengambil focus ke dampak konflik terhadap tataran DPD atau daerah. Reaksi – reaksi dari DPD Golkar yang berada di bawah dirasa menarik untuk diteliti dan diteladani agar dapat menjadi pembelajaran terhadap partai Golkar itu sendiri maupun partai – partai politik selain Golkar.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka timbul pertanyaan yang akan dikemukakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa sajadampak dari konflik yang terjadi dalam internal DPP Golkar terhadap DPD Golkar Kota Surabaya ?
2. Bagaimana sikap dan tanggapan elite DPD Golkar Kota Surabaya dalam menghadapi konflik tersebut?

### **1.3. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah yang ada adalah :

1. Untuk mengetahui dampak dari konflik yang terjadi di dalam internal DPP Partai Golkar terhadap DPD Golkar Surabaya serta;
2. Untuk mengetahui sikap, tanggapan dan juga solusi dari DPD Partai Golkar Surabaya terhadap Konflik yang terjadi demi keberlangsungan roda organisasi partai.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian ini penulis lakukan, penulis berharap beberapa manfaat yang muncul adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih dan menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi literatur ilmu politik, khususnya dalam konflik politik pada partai politik.
- b. Bagi penulis, penelitian ini dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan di bidang politik serta melatih penulis dalam mengasah dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
- c. Memberikan tambahan pengetahuan khususnya bagi kalangan akademisi yang mempunyai jiwa intelektual.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi partai politik terkait yaitu Partai Golkar baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan juga Nasional dalam penyelesaian dari dampak yang terjadi akibat konflik internal Partai Golkar.

#### **1.5. Kerangka Konseptual**

##### **1.5.1. Partai Politik**

Partai politik merupakan pencerminan dari negara yang demokratis yang diyakini sebagai prasarat bagi kehidupan negara moderen. Tanpa menunjuk kepentingan yang mana dan oleh siapa, jelas bahwa partai politik merupakan lembaga penyalur kepentingan, yang menyalurkan kepentingan rakyat dan kepentingan penguasa. Sebagai lembaga penyalur kepentingan, partai politik dijadikan komunikasi yang berfungsi dua arah, yaitu dari atas ke bawah dan juga

dari bawah ke atas. Jika hal itu dapat terlaksana dengan baik, maka fungsi partai politik sebagai sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, serta pembuatan kebijakan dapat berjalan dengan baik sehingga pembangunan politik yang diharapkan dapat terwujud.

Dalam sistem politik demokrasi modern terdapat sistem demokrasi perwakilan yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan partai politik. Di negara demokrasi, partai politik adalah suatu keniscayaan karena berkaitan erat dengan kemunculan lembaga-lembaga perwakilan sebagai sarana politik untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Prinsip pemerintahan demokrasi, yakni "oleh rakyat" diwujudkan dengan adanya partai politik dan "dari rakyat" dapat diukur dari hasil pemilihan umum yang bersifat umum, langsung, bebas, rahasia, dan adil. Sedangkan menurut Masad Masrur sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa partai politik. Menurut UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, bahwasanya partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Republik Indonesia berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang – orang yang mempunyai pikiran serupa

sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.<sup>15</sup>

Orang pertama yang memperkenalkan kata *politik* adalah Aristoteles melalui pengamatannya tentang “manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik”.<sup>7</sup> Ia menjelaskan hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Dalam arti luas setiap orang adalah politisi. Dalam hal ini Aristoteles berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk memaksimalkan kemampuan seorang individu dan untuk mencapai bentuk kehidupan sosial yang tertinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain dalam suatu kerangka kelembagaan, yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan untuk membentuk tujuan kolektif-negara. Karena itu semua orang adalah politisi, meski sebagian (penjabat negara) lebih banyak melakukan kegiatan politik bila dibandingkan dengan yang lainnya<sup>16</sup>.

Dalam perjalanan waktu dan perkembangan zaman, partai politik mulai dapat diklasifikasikan dalam 3 klasifikasi.

- Sistem partai tunggal

Di masyarakat luas sistem partai ini adalah partai yang benar – benar merupakan satu – satunya partai dalam suatu Negara maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lain.

<sup>15</sup>Miriam Budiarto. *Dasar – dasar ilmu politik*. PT. Gramedia pustaka utama, Jakarta. Hal. 403

<sup>16</sup>Elly Rosana. *Partai politik dan perkembangan politik*. Jurnal TAPIS Vol.8 No.1 Januari-Juni 2012. Hal 138

Dalam kategori terakhir terdapat banyak variasi. Pola partai tunggal terdapat di beberapa Negara, antara lain Afrika, China, dan kuba, sedangkan dalam masa jayanya Uni soviet dan beberapa Negara Eropa Timur termasuk dalam kategori ini. Suasana kepartaian dinamakan non kompetitif karena semua partai harus menerima pimpinan dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan bersaing dengannya.<sup>17</sup>

- Sistem dwi partai

Dalam sistem ini partai – partai engan jelas dibagi dalam partai yang berkuasa (karena menang dalam pemilihan umum) dan partai oposisi (karena kalah dalam pemilihan umum). Dengan demikian jelaslah di mana letak tanggung jawab mengenai pelaksanaan kebijakan umum. Dalam sistem ini partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama tapi yang setia terhadap kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peran ini sewaktu – waktu dapat bertukar tangan. Dalam persaingan memenangkan pemilihan umum kedua partai berusaha untuk merebut dukungan orang – orang yang ada di tengah dua partai dan yang sering dinamakan pemilih terapung (floating vote) atau pemilih di tengah (median vote).<sup>18</sup>

- Sistem multi partai

Ummnya dianggap bahwa keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat mendorong pilihan kearah sistem multi – partai. Perbedaan tajam antara ras, agama, atau suku bangsa mendorong golongan –

<sup>17</sup>Mirriam Budiarjo. *Dasar – dasar ilmu politik*. Hal 415

<sup>18</sup>Miriam budiarjo. *Dasar – dasar ilmu politik*. Hal 417



golongan masyarakat lebih cenderung menyalurkan ikatan – ikatan terbatasnya (primodial) dalam satu wadah yang sempit saja. Dianggap bahwa pola multi – partai lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik daripada pola dwi – partai. Sistem multipartai ditemukan antara lain di Indonesia, Malaysia, Netherland, Australia, Prancis, Swedia, dan Federasi Rusia.<sup>19</sup>

Adapun klasifikasi partai berdasarkan tingkat komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan, diantaranya :

1. **Partai Proto** : adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini. Ciri yang paling menonjol partai ini adalah pembedaan antara kelompok anggota atau “ins” dengan non-anggota “outs”. Selebihnya partai ini belum menunjukkan ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern. Karena itu sesungguhnya partai ini adalah faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologi masyarakat;
2. **Partai Kader** : merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai proto. Keanggotaan partai ini terutama berasal dari golongan kelas menengah ke atas.
3. **Partai Massa** : Muncul saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai respon politis dan organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. Partai massa berorientasi pada pendukungnya yang luas, misalnya buruh,

---

<sup>19</sup>Miriam budiarjo. *Dasar – dasar ilmu politik*. Hal 418

petani, dan kelompok agama, dan memiliki ideologi cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi.

4. **Partai Diktatorial** : Sebenarnya merupakan sub tipe dari partai massa, tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan maupun anggota partai. Rekrutmen anggota partai dilakukan secara lebih selektif daripada partai massa.
5. **Partai Catch-all**: Merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Istilah Catch-all pertama kali di kemukakan oleh Otto Kirchheimer untuk memberikan tipologi pada kecenderungan perubahan karakteristik. Catch-all dapat diartikan sebagai “menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya”. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai pengganti ideologi yang kaku<sup>20</sup>

Partai sebagai asosiasi yang mengaktifkan, memobilisasi rakyat, dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat – pendapat yang bersaing dan memunculkan kepemimpinan politik, telah menjadi keharusan dewasa ini. Partai telah menjadi fenomena umum dalam kehidupan politik. Partai adalah alat untuk memperoleh kekuasaan dan memerintah. Partai telah digunakan untuk mempertahankan pengelompokan yang sudah mapan – seperti gereja – atau untuk menghancurkan status quo.

<sup>20</sup>Ichlasul Amal. Teori-teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi. Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996

Adapun tipologi partai yang disarankan untuk memberikan suatu aturan bilamana terdapat kebingungan yang mendalam dan untuk mempermudah bilamana muncul kekaburan yang sangat luar biasa. Suatu tipologi partai dan sistem kepartaian hendaknya didasarkan pada sumber dukungan partai, organisasi internal dan fungsi yang dilakukan dan cara – cara tindakannya.

*Sumber – sumber dukungan partai* : disarankan satu pembedaan dasar komprehensif lawan sekretarian. Yang termasuk komprehensif adalah semua partai politik yang berorientasi pada pengikut yaitu partai yang berusaha mendapatkan suara sebanyak mungkin dari setiap warga Negara. Partai sekretarian adalah partai – partai sosialis dan agamis adalah bersifat sekretarian , tetapi mereka tidak eksklusif.

*Organisasi internal* : dua tipe dasar yang diajukan adalah bersifat tertutup dan terbuka. Partai tertutup adalah partai dengan keanggotaan terbatas atau partai yang mengenakan kualifikasi yang ketat untuk keanggotaannya. Cenderung kepemimpinannya otoriter. Sedangkan partai terbuka adalah partai – partai yang memperbolehkan siapapun masuk menjadi anggota partai.

*Cara – cara bertindak dan fungsi* : dua tipe dasar yang diajukan adalah *diffused* (menyebarkan) dan *specialized* (khusus). Partai yang terspesialisasi menekankan dan perumusan kebijaksanaan, partisipasi, serta kontrol pemerintah untuk maksud – maksud terbatas dan untuk suatu periode waktu tertentu, sedangkan partai yang *diffused* menekankan integrasi, pengawasan permanen dan total, mobilisasi dan pembangunan institusi.

### 1.5.2. Konflik

Soerjono Soekanto memberikan pengertian konflik berdasarkan tujuan. Menurutnya pengertian konflik adalah pertentangan untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Senada dengan Soekanto, Lewis A. Coser dalam buku *The function of Social conflict*, pengertian konflik adalah perjuangan nilai atau tuntutan atas status. Ditambahkan bahwa konflik adalah bagian dari masyarakat yang akan selalu ada, sehingga apabila ada masyarakat akan muncul. Menurut Wahjono konflik merupakan suatu proses yang mulai bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, atau segera mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang menjadi perhatian pihak pertama.<sup>21</sup> Definisi tersebut merupakan pengertian yang luas yang menjelaskan bahwa suatu titik pada setiap kegiatan yang tengah berlangsung bila suatu interaksi “bersilangan” dapat menjadi suatu konflik antar pihak. Definisi sebagai mana dikemukakan tersebut cukup fleksibel yang mencakup semua rentang tingkat konflik, dari tindakan yang terbuka dan penuh kekerasan sampai ke bentuk halus dari ketidaksepakatan.

Menurut Robbins konflik adalah suatu proses dengan mana usaha yang dilakukan oleh A untuk mengimbangi usaha - usaha B dengan cara merintanginya yang menyebabkan B frustrasi dalam mencapai tujuan atau meningkatkan keinginannya.<sup>22</sup> Menurut AL Banesc konflik merupakan kondisi yang dipersepsikan ada di antara pihak - pihak merasakan adanya ketidak sesuaian

<sup>21</sup>Sentot Imam Wahjono. 2010. Perilaku Organisasi. Jakarta Hal 106

<sup>22</sup>Komang Ardana. 2009. Perilaku Organisasi. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 112

tujuan dan peluang untuk mencampuri usaha pencapaian tujuan.<sup>23</sup> Menurut Schmidt dan Kochan konflik merupakan suatu perselisihan atau perjuangan di antara dua pihak yang ditandai dengan menunjukkan permusuhan secara terbuka dan/atau mengganggu dengan sengaja pencapaian tujuan pihak yang menjadi lawannya. Gangguan yang dilakukan dapat meliputi usaha – usaha yang aktif atau penolakan pasif<sup>24</sup>

### 1.5.3. Pengelolaan Konflik

Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan. Bahkan sepanjang kehidupan, manusia senantiasa dihadapkan dan bergelut dengan konflik. Demikian halnya dengan kehidupan organisasi. Anggota organisasi senantiasa dihadapkan pada konflik. Setiap saat tanpa kita menunggu konflik akan datang pada sendirinya. Seseorang hanya bisa menyesuaikan konflik dan tidak bisa menghindari terjadinya konflik. Untuk menyeseuikannya kita memerlukan manajemen konflik disini.

Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (interests) dan interpretasi.<sup>25</sup>

#### A. Metode Stimulasi Konflik

Seperti telah disebutkan dimuka, konflik dapat menimbulkan dinamika dan pencapaian cara-cara yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan kerja suatu

<sup>23</sup>Ibid.

<sup>24</sup>Ibid.

<sup>25</sup> <https://communicationista.wordpress.com/2010/02/07/manajemen-konflik-dalam-organisasi/>

kelompok. Situasi dimana konflik terlalu rendah akan menyebabkan kariawan takut berinisiatif dan menjadi pasif. Oleh karena itu seorang manajer dituntut untuk memperhatikan konflik, dan selain itu juga harus bisa meredam ketakutan terhadap konflik.<sup>26</sup> Manajer dari kelompok seperti ini perlu merangsang timbulnya persaingan dan konflik yang dapat mempunyai efek penggemblen Metode stimulasi konflik meliputi:

- a) Pemasukan atau penempatan orang luar kedalam kelompok
- b) Penyusunan kembali organisasi
- c) Penawaran bonus, pembayaran insentif dan penghargaan untuk mendorong persaingan
- d) Pemilihan manajer-manajer yang tepat
- e) Perlakuan yang berbeda dengan kebiasaan

#### B. Metode Pengurangan Konflik

Manajer biasanya lebih terlibat dalam pengurangan konflik daripada stimulasi konflik. Metode pengurangan konflik menekankan terjadinya antagonisme yang ditimbulkan oleh konflik. Jadi, metode ini mengelola tingkat konflik melalui” tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik.

Dua metode efektif yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik. metode efektif pertama adalah mengganti tujuan yang menimbulkan persaingan dengan tujuan yang lebih bisa diterima kedua kelompok. Metoda

<sup>26</sup>Dr. William hendrik.2001. *Bagaimana mengelola konflik*. Jakarta: Bumi Aksara. hal 1

efektif kedua adalah mempersatukan kedua kelompok yang bertentangan untuk menghadapi „ancaman“ atau „musuh“ yang sama.

### C. Metode Penyelesaian Konflik

Kegiatan-kegiatan para menejer yang dapat secara langsung mempengaruhi pihak-pihak yang bertentangan. Metode-metode penyelesaian konflik lainnya yang dapat digunakan mencakup perubahan dalam struktur organisasi, mekanisme koordinasi, dan sebagainya.<sup>27</sup>

#### 1.5.4. Sikap Politik

Menurut Plano, sikap politik merupakan pertalian diantara berbagai keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu objek atau situasi politik dengan suatu cara-cara tertentu. Sikap politik tergantung dari persoalan-persoalan para pemimpin, gagasan-gagasan, lembaga-lembaga atau peristiwa-peristiwa politik.<sup>28</sup> Walaupun sikap lebih abadi daripada pikiran atau suasana hati yang fana, namun sikap cenderung berubah sesuai dengan berlakunya waktu dan dengan berubahnya keadaan dan cenderung dipengaruhi oleh berbagai macam motif (karena sikap itu sifatnya insidental) tergantung dari kondisi atau peristiwa yang mendukung dan melatarbelakanginya.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap politik adalah kecenderungan yang mempunyai pengaruh tertentu terhadap tanggapan orang lain untuk menilai objek dalam sistem politik.

## 1.6. Kerangka Teori

### 1.6.1 *Intra Party Politics*

<sup>27</sup> Theisol.blogspot.com.2013. Makalah-manajemen-konflik. Hal 7

<sup>28</sup> Khoirudin, 2004. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, yogyakarta. Hal 95

Partai Politik merupakan sebuah komponen dan aktor utama dari sistem politik demokrasi. Komponen yang dimaksudkan disini bisa dikatakan sebagai peserta pemilu eksekutif dan legislatif di tingkat nasional ataupun di daerah ataupun sebagai jembatan antara rakyat dan negara. Partai politik dikatakan sebagai jembatan tersebut dikarenakan partai politik melaksanakan peran sebagai representasi politik rakyat dalam menyuarkan aspirasi dan kehendak rakyat serta memperjuangkannya menjadi bagian dari sebuah kebijakan publik yang dihasilkan.

Oleh karena tugas dan fungsi dari partai politik sebagai representasi rakyat tersebut maka partai politik sebagai wujud dari aplikasi demokrasi seharusnya tidak mewujudkan demokrasi di eksternal partai saja melainkan di dalam partai politik itu sendiri.<sup>29</sup> Memang Demokrasi muncul terlebih dahulu daripada partai politik, akan tetapi dalam sistem demokrasi modern keduanya tidak dapat dipisahkan. Bahkan sistem demokrasi tidak dapat eksis atau berdiri tanpa adanya partai politik dan sistem kepartaian. Karena partai politik merupakan salah satu aktor utama demokrasi, partai politik secara internalpun haruslah demokratis.<sup>30</sup>

Akan tetapi Robert Michels, yang dikenal sebagai teoritis tentang *Iron Law of Oligarchy*, menyatakan bahwa organisasi politik yang berlingkup besar seperti partai politik, bahkan setiap organisasi besar, cenderung dikelola secara oligarkis yang lebih melayani kepentingan sendiri daripada kepentingan

<sup>29</sup>Surbakti Ramlan dan Didik Supriyanto. 2013. Seri Demokrasi Elektoral : Mendorong Demokrasi Internal Partai Politik. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan. Hlm 2.

<sup>30</sup>Ibid. Hal 5.



organisasi.<sup>31</sup>Berikut adalah penjelasan Michels mengapa setiap organisasi yang kompleks cenderung dikelola secara oligarkis. Organisasi yang pada awalnya idealistik dan demokratis kemudian didominasi oleh sekelompok kecil pemimpin yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan juga untuk mempertahankan jabatannya.Semua organisasi yang kompleks, termasuk partai politik cenderung dikelola secara oligarkis karena kegiatan sehari-hari organisasi yang kompleks itu tidak mungkin dikelola oleh keanggotaan massal. Tidak mungkin memanggil massa anggota bersidang setiap kali partai politik hendak membuat keputusan. Pengambilan keputusan lebih dapat dilakukan oleh sekelompok kecil kalangan profesional yang penuh-waktu memimpin dan mengarahkan organisasi.

Secara formal, pemimpin organisasi dipilih oleh dan akuntabel kepada para anggota.Akan tetapi dalam praktik, justru pemimpinlah yang mengontrol para anggota. Hal ini tidak lain karena para pemimpin itu memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola organisasi. Mereka mengendalikan sarana komunikasi dalam organisasi dan secara formal bertindak mewakili organisasi ke dalam dan keluar.Massa anggota mengalami kesulitan dalam mengkaunter kepemimpinan yang dipegang oleh mereka yang memiliki keahlian dan pengalaman.Sekelompok kecil pemimpin ini makin lama makin merasa tak tergoyahkan, bahkan merasa jauh lebih mampu daripada mereka yang seharusnya mereka layani. Bahkan mereka semakin lama semakin jauh dari massa anggota yang memilihnya. Ketidakmampuan para anggota ini lebih diperburuk oleh

---

<sup>31</sup> Robert Michel. 2001. Political Parties: Sociological Studies of the Oligarchical Tendency of Modern Democracy. Kitchener. Ontario Kanada: Batoche Books.

kecenderungan massa yang tergantung kepada pemimpin, yaitu kebutuhan psikologis massa untuk dipimpin.

Menurut Richard S. Katz, seleksi kandidat merupakan salah satu fungsi khas partai politik dalam demokrasi. Hal ini tidak hanya karena seleksi kandidat untuk bersaing pada pemilihan umum merupakan salah satu fungsi yang membedakan partai politik dari organisasi lain yang mungkin berupaya mempengaruhi hasil pemilihan umum dan keputusan yang akan diambil pemerintah. Kekhasan fungsi itu juga karena kandidat yang dinominasikan memainkan peran penting dalam menentukan karakteristik partai politik yang bersangkutan di depan publik.<sup>32</sup>Kandidat partai itulah yang lebih banyak menggambarkan wajah partai kepada publik dalam pemilihan umum. Karena itu partisipasi para anggota partai dalam penentuan kandidat menjadi suatu keharusan.

Susan Scarrow mengemukakan agar demokratisasi partai secara internal dipandang sebagai obyek transisi masyarakat ke demokrasi. Karena itu, demokratisasi partai secara internal bukanlah tujuan, melainkan sarana yang akan memiliki dampak positif pada negara dan perkembangan demokrasi dalam masyarakat.

Namun demokratisasi partai secara internal memiliki sejumlah risiko. Terlalu banyak demokratisasi partai secara internal akan berakibat “*overly dilute the power of a party’s inner leadership and make it difficult for that party to*

---

<sup>32</sup> Richard S. Katz. 2001. The Problem of Candidate Selection and Models of Party Democracy. dalam Party Politics. Volume 7. Nomor 3.

*keeps its electoral promise*".<sup>33</sup>Prosedur seleksi kandidat yang terlalu terbuka atau terlalu cepat dibuka akan menciptakan konflik antarfaksi dalam partai sehingga pada gilirannya akan membuat partai menjadi organisasi yang tidak efektif sekaligus juga akan memperlemah kapasitas partai dalam pemilihan umum. Metode seleksi kandidat yang terbuka dalam beberapa kasus justru meningkatkan kekuasaan sekelompok kecil elite.

Secara sederhana demokrasi partai secara internal dapat diartikan sebagai proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan untuk melaksanakan fungsi partai secara terbuka, partisipatif, dan deliberatif berdasarkan peraturan perundangundangan, AD/ART, dan peraturan partai. Konstitusi dan dokumen resmi partai politik (AD/ART dan peraturan partai) seharusnya secara ideal mendorong nilai-nilai demokrasi secara internal dalam organisasi partai. Dengan demikian, pengelolaan partai melibatkan seluruh aktivis dalam proses pembuatan keputusan pada semua tingkatan organisasi partai, seperti pertemuan dialogis untuk membahas penjabaran ideologi partai menjadi berbagai program pembangunan bangsa yang akan ditawarkan pada pemilu, dan menjamin kesempatan dan peran kepada para anggota dalam proses seleksi kepemimpinan partai dan seleksi calon anggota badan legislatif dan eksekutif pada semua tingkatan.<sup>34</sup>

Karena partai politik diharapkan melaksanakan berbagai fungsi penting, seperti mobilisasi warga negara dalam proses politik, agregasi berbagai kepentingan dalam masyarakat, merumuskan dan memperjuangkan kebijakan

<sup>33</sup> Susan Scarrow. 2005. *Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives: Implementing Intra-Party Democracy*. Washington DC.: NDI.

<sup>34</sup>Loccit. Ramlan Surbakti. Hal 14.

publik, melaksanakan perekrutan kepemimpinan politik, dan koordinasi parlemen dan pemerintahan ataupun mengingat peran sentral partai dalam demokrasi perwakilan; kebijakan yang didesain untuk memperkuat kapasitas internal organisasi mestinya menjadi prioritas utama.

Dari berbagai uraian di atas mengenai demokrasi internal partai, maka demokrasi internal partai mencakup beberapa hal sebagai berikut<sup>35</sup> :

- 1) Hak anggota partai (partisipasi);
- 2) Keterwakilan berbagai unsur dalam partai;
- 3) Pemilihan pengurus partai tingkat pusat;
- 4) Pelembagaan prinsip dan prosedur demokrasi dalam pengelolaan partai;
- 5) Demokratisasi sumber keuangan partai;
- 6) Transparansi dan akuntabilitas partai;
- 7) Hubungan partai dengan fraksi partai di lembaga legislatif;
- 8) Otonomi pengurus partai tingkat lokal;
- 9) Kewenangan pengurus cabang pada pemilu lokal;
- 10) Peran partai tingkat pusat dalam pemilu nasional.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Jenis penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian deskriptif adalah

---

<sup>35</sup>Ibid

suatu pengumpulan fakta-fakta dari suatu keadaan yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang sesuatu dengan jelas terhadap suatu keadaan.<sup>36</sup>

### **1.7.2. Unit Analisis**

Unit analisis dalam dalam penelitian dampak konflik DPP Partai Golkar terhadap DPD Partai Golkar Surabaya adalah para kader partai Golkar di Surabaya baik kader yang muda dan kader yang telah menjadi senio yang telah menjadi pengurus Partai sehingga dapat memberikan informasi lebih dalam tentang judul terkait.

### **1.7.3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada DPD Partai Golkar di Kota Surabaya. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti untuk mempermudah dalam hal pengambilan data dan penguasaan daerah ketika terjun ke lapangan untuk melaksanakan penelitian.

Waktu penelitian yang digunakan mulai dari persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, hingga penyusunan skripsi adalah awal Bulan Maret hingga akhir Bulan Mei tahun 2015.

### **1.7.4. Subyek Penelitian**

Penelitian ini ditujukan kepada Partai Golkar Surabaya. Dalam penelitian ini diperlukan adanya subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah para informan. Informan merupakan narasumber yang dapat memberikan informasi dan penjelasan-penjelasan yang diperlukan peneliti dalam proses penelitian.

---

<sup>36</sup> David Marsh, Gerry Stocker. 2010. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media. Hlm. 74

Informan dalam penelitian ini ditentukan oleh peneliti. Dalam menentukan informan, peneliti terlebih dahulu harus mengetahui keterlibatan informan dengan tema penelitian serta kemampuan informan dalam memberikan segala informasi yang di butuhkan peneliti. Informan yang dipilih juga merupakan informan yang mengetahui dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti. Informan yang peneliti pilih merupakan informan yang berasal dari elit partai Golkar dan para kader muda yang masuk di dalam struktur kepengurusan partai.

#### **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam prosesnya sehingga peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan yang telah ditetapkan dalam teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data harus sesuai dengan tata cara dan aturan teknik-teknik pengumpulan data yang harus dilakukan dengan baik dan teratur. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan observasi, wawancara secara mendalam serta analisis pada dokumen yang didapatkan oleh peneliti.

Untuk pemilihan narasumber dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive*, dimana dalam memilih diambil secara sengaja dan disertai dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sedangkan untuk informan kunci (*key informan*) ditentukan dengan menggunakan teknik *snowball*, dimana penentuan sampel informan kunci dimulai dari satu orang yang memiliki pemahaman memadai tentang permasalahan yang dikaji, kemudian orang tersebut

diminta untuk memilih seseorang atau temannya untuk dijadikan informan kunci berikutnya.

Di dalam jenis data ini, terdapat dua jenis data yang diperoleh dan dapat digunakan oleh peneliti, yang pertama adalah data-data utama atau primer serta data sekunder sebagai data sampingan untuk lebih melengkapi data primer dalam penelitian ini.

### **1.7.6 Wawancara**

Dalam penelitian kualitatif, data utama didapatkan melalui wawancara dengan informan yang terkait dengan penelitian ini. Dengan wawancara secara langsung, peneliti akan mendapatkan data-data utama untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah penelitian.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti akan meminta izin kepada informan terlebih dahulu untuk bersedia melakukan wawancara. Dalam proses wawancara diperlukan alat-alat bantu untuk melancarkan kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, seperti catatan buku, alat perekam contohnya handphone. Sebelum wawancara, peneliti akan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan atau pedoman wawancara yang akan diajukan ketika mewawancarai informan sehingga wawancara lebih terkontrol dan akan menemukan titik temu untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada informan yang terkait dengan Partai Golkar Kota Surabaya.

### **1.7.7 Jenis Data**

Di dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data yang dipergunakan oleh peneliti, yaitu data-data utama atau primer serta data sekunder sebagai data sampingan untuk lebih melengkapi data primer dalam penelitian ini.

#### **1.7.7.1 Data Primer**

Data primer yang biasa disebut sebagai data utama dari setiap penelitian ini didapat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan tema penelitian. Peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pokok utama yang nantinya akan ditanyakan kepada informan. Pertanyaan yang ditanyakan kepada informan untuk mendapatkan data utama sebaiknya diatur secara berurutan agar informan mudah dalam menjelaskan permasalahan yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Data primer yang digunakan oleh peneliti adalah tanggapan mengenai konflik yang terjadi di DPP Partai Golkar, dampak yang terjadi di dalam internal Partai Golkar Surabaya dan pandangan tentang partisipasi pilwali Surabaya dengan kondisi partai yang seperti itu. Data primer ini peneliti dapatkan dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan Partai Golkar Kota Surabaya.

#### **1.7.7.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data-data yang didapat untuk mendukung data-data primer. Data sekunder di dapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari buku harian, notulen rapat perkumpulan, dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa koran harian, majalah, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-



lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, skripsi terdahulu, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya.

Data sekunder didapatkan peneliti untuk mendukung data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam yaitu dari arsip dokumen-dokumen yang didapatkan dari berita-berita yang di terbitkan melalui media sosial seperti internet dimana terkait dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan para informan.

#### **1.7.8 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Alasan penggunaan metode kualitatif:<sup>37</sup> Pertama, lebih mudah menyesuaikan di lapangan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda: kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat peneliti dengan subjek penelitian. Teknik analisis data ini bertujuan untuk menyusun data agar tersusun rapi, dimana di mulai dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait serta kumpulan bahan-bahan yang didapat untuk menunjang penelitian. Selain itu data-data primer dan data sekunder yang di dapat peneliti juga akan menunjang dalam menganalisis data.

Proses analisis data ini dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Ida Bagoes Mantra. 2004. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 76

<sup>38</sup> Lisa Horrison. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Pernada Group. Hlm. 87

- Reduksi data atau penyederhanaan data, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.
- Paparan data, menyusun data dalam satu kesatuan.
- Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu kegiatan menyimpulkan makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokkannya.

Dalam proses menganalisis data yang dilakukan pertama kali adalah melakukan transkrip hasil wawancara dan ditata dengan baik sesuai urutan-urutan pertanyaan permasalahan dalam penelitian. Setelah itu dilakukan pemetaan dan penyederhanaan data, kemudian dilakukan penyusunan data agar tersusun rapi. Langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil temuan data dengan menghubungkan teori yang relevan, setelah itu mulai menyusun suatu kesimpulan.